



**PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DALAM
MEMBEDAKAN KONDISI *FINANCIAL DISTRESS***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan
yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2017)**

SKRIPSI

Oleh

Yunaira Setyo Winandri

NIM 160810301121

**PROGRAM STUDI SI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DALAM
MEMBEDAKAN KONDISI *FINANCIAL DISTRESS***

(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan
yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2017)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Yunaira Setyo Winandri

NIM 160810301121

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin atas berkat rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka selesailah tugas akhir dan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Saya persembahkan sebagai rasa hormat dan ungkapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh kesabaran;
2. Kedua orang tua saya, yaitu mama saya tercinta Menik Andriyani yang selalu tulus memberikan doa, dukungan, serta motivasi, dan ayah saya Wien Supriyono (alm);
3. Untuk dosen pembimbing saya Bapak Drs. Wasito, M.Si, Ak. dan Bapak Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak. yang selalu sabar membimbing saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan secara maksimal;
4. Para dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga saya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;
5. Para guru-guru saya sejak TK sampai dengan SMA yang telah memberikan saya ilmu yang bermanfaat;
6. Keluarga besar saya yang selama ini telah membantu, mendoakan, dan memberi dorongan semangatnya kepada saya;
7. Sahabat serta rekan yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa dalam pembuatan skripsi hingga akhir;
8. Dan Almamater tercinta yang akan selalu saya banggakan yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas dan tulus sehingga skripsi ini dapat terselesaikan secara maksimal. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya. Penulis sadar atas keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti mohon kritik dan saran untuk kemajuan peneliti selanjutnya.

MOTTO

“karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan...”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunaira Setyo Winandri

NIM : 160810301121

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul **“PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DALAM MEMBEDAKAN KONDISI *FINANCIAL DISTRESS* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2017)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Desember 2019

Yang menyatakan,

Yunaira Setyo Winandri

NIM. 160810301121

SKRIPSI

**PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DALAM
MEMBEDAKAN KONDISI *FINANCIAL DISTRESS***

(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan
yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2017)

Oleh

Yunaira Setyo Winandri

NIM 160810301121

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Wasito, M.Si, Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT
DALAM MEMBEDAKAN KONDISI FINANCIAL
DISTRESS (Studi Empiris pada Perusahaan
Pertambangan yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2017)
Nama Mahasiswa : Yunaira Setyo Winandri
NIM : 160810301121
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 12 Desember 2019

Yang menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Wasito, M.Si, Ak.

NIP. 196001031991031001

Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak.

NIP. 197004281997021001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak.

NIP. 197809272001121002

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI**

**PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DALAM
MEMBEDAKAN KONDISI *FINANCIAL DISTRESS*
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar
di BEI tahun 2015-2017)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Yunaira Setyo Winandri

NIM : 160810301121

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal: **30 Desember 2019**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak. (.....)
NIP. 196608051992012001

Sekretaris : Rochman Effendi, S.E., M.Si, Ak. (.....)
NIP. 197102172000031001

Anggota : Oktaviani Ari Wardhaningrum, S.E., M.Sc (.....)
NIP. 760016882

Mengetahui/Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad., S.E., M.M., Ak
NIP. 19710727 199512 1 001

Yunaira Setyo Winandri

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Perkembangan zaman menuntut perusahaan untuk terus berkembang mempersiapkan diri terhadap persaingan yang sedang terjadi. Ketidaksiapan perusahaan dalam menghadapi persaingan dapat menyebabkan banyak permasalahan salah satunya adalah kesulitan keuangan (*financial distress*). *Financial distress* dapat dihindari dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Salah satu unsur penting dalam *Good Corporate Governance* adalah keberadaan komite audit. Komite audit yang efektif akan tercapai jika didukung dengan karakteristik-karakteristik yang sesuai dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 2 (dua) bentuk variabel penelitian yaitu *financial distress* sebagai variabel terikat yang diukur dengan nilai *Return On Asset* (ROA) dan karakteristik komite audit yang terdiri dari ukuran komite audit, komite audit independen, frekuensi rapat komite audit sebagai variabel bebas. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode *purposive sampling* yaitu sebanyak 128 data perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI untuk periode 2015-2017. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan model regresi logistik untuk analisis data.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan dalam membedakan perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.

Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan, Karakteristik Komite Audit, *Financial Distress*.

Yunaira Setyo Winandri

Accounting Departement, Economics and Business Faculty, Jember University

ABSTRACT

Companies need to maintain developing and preparing themselves for the competition that is cureently happening. Unpreparedness of the company to face competition can cause many problems, one of which is financial distress. Financial distress can be avoided with Good Corporate Governance. One important element in Good Corporate Governance is the existence of an audit committee. An effective audit committee will be achieved if it is supported by appropriate characteristics and meets the specified requirements.

This study uses quantitative research with 2 (two) forms of research variables, financial distress as the dependent variable measured by the value of Return On Assets (ROA) and the characteristics of the audit committee consisting of the size of the audit committee, independent audit committee, frequency of audit committee meetings as independent variable. The total sample used in this study with a purposive sampling method is 128 data mining companies listed on the Stock Exchange for the period 2015-2017. Data collection procedures in this study use the documentation method with logistic regression models for data analysis.

The results obtained in this study are that the frequency of audit committee meetings has a significant effect in distinguishing companies that experience financial distress and companies that do not experience financial distress.

Keywords : *corporate governance, characteristics of the audit committee, financial distress.*

RINGKASAN

PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DALAM MEMBEDAKAN KONDISI *FINANCIAL DISTRESS* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2017); Yunaira Setyo Winandri, 160810301121; 2019; 50 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Financial distress adalah suatu indikasi awal terjadinya kebangkrutan pada sebuah perusahaan. Menurut Brigham dan Dave (2011), *financial distress* dimulai saat perusahaan tidak mampu memenuhi jadwal pembayaran atau ketika arus kas perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tidak akan dapat memenuhi kewajibannya. *Financial distress* dapat dihindari jika perusahaan mampu mewujudkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan baik, salah satunya dengan membentuk komite audit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan pengaruh karakteristik komite audit terhadap perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. Karakteristik komite audit yang diteliti yaitu; ukuran komite audit, komite audit independen, dan frekuensi rapat komite audit. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data sekunder laporan keuangan dan laporan tahunan yang tersaji di Bursa Efek Indonesia. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan model regresi logistik untuk analisis data.

Hasil penelitian diperoleh bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan dalam membedakan perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. Sedangkan kedua variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan dalam membedakan perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.

SUMMARY

THE IMPACT OF AUDIT COMMITTEE CHARACTERISTICS IN DISTINGUISHING FINANCIAL DISTRESS CONDITION (Empirical Study of Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2015-2017); Yunaira Setyo Winandri, 160810301121; 2019; 50 Pages; Accounting Departement, Economics and Business Faculty, Jember University.

Financial distress is an early indication of bankruptcy in a company. According to Brigham and Dave (2011), financial distress begins when the company is unable to meet the payment schedule or when the company's cash flow indicates that the company will not be able to meet its obligations. Financial distress can be avoided if the company is able to realize the implementation of Good Corporate Governance properly, one of which is by forming an audit committee.

This study aims to determine the differences in the influence of the characteristics of the audit committee on companies that experience financial distress and companies that do not experience financial distress. The characteristics of the audit committee under study are; the size of the audit committee, the independent audit committee, and the frequency of audit committee meetings. This type of research is a quantitative method with secondary data on financial statements and annual reports presented on the Indonesia Stock Exchange. Data collection procedures in this study use the documentation method with logistic regression models for data analysis.

The results showed that the frequency of audit committee meetings had a significant effect in distinguishing companies that experienced financial distress and companies that did not experience financial distress. While the other two variables did not significantly influence the difference between companies that experienced financial distress and companies that did not experience financial distress.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT DALAM MEMBEDAKAN KONDISI FINANCIAL DISTRESS (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2017)”. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasihnya kepada:

1. Allah SWT karena ridho dan kehendak-Nya lah saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
2. Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak, CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dr. Agung Budi Sulistyono, S.E, M.Si, Ak. selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Bunga Maharani, S.E., M.SA. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Drs. Wasito, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, arahan dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah;
8. Orang tuaku, khususnya mama tercinta Menik Andriyani dan ayah tersayang Wien Supriyono (alm), serta kakak-kakakku Mas Aci. Mbak Mar, Mbak Gretta, dan Mas Har yang selalu memberikan semangat, nasehat, motivasi, dan doa yang terbaik dalam proses belajar saya dan proses penyelesaian skripsi ini;

9. Keponakanku si cantik Queen dan si imut Bilqis yang menjadi penghiburku;
10. Diri saya sendiri, Yunaira terima kasih kamu sudah menjadi kuat;
11. Sahabat-sahabatku GePe, Dimas, Nady, Dini, dan masih banyak lagi yang tidak pernah lelah memberikan motivasi, dukungan, kritik, dan saran yang membangun (*I love you guys, thank you for stay, it means a lot*);
12. Teman-teman Akuntansi angkatan 2016, teman-teman KSPM, teman-teman GenBI, teman-teman *volunteer* dan *internship*;
13. Keluarga KKN Desa Gunungsari, Bondowoso; dan
14. Semua pihak yang tidak mampu saya sebutkan satu-persatu yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, 16 Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>.....	ix
RINGKASAN.....	x
<i>SUMMARY</i>.....	xi
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6

1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	7
2.1.2 <i>Financial Distress</i>	8
2.1.3 <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	10
2.1.4 Komite Audit.....	13
2.1.4.1 Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang	14
2.1.4.2 Ukuran Komite Audit	15
2.1.4.3 Komite Audit Independen	16
2.1.4.4 Frekuensi Rapat Komite Audit	18
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Kerangka Penelitian	10
2.4 Hipotesis Penelitian	14
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Pendekatan Penelitian	25
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	25
3.3 Jenis dan Sumber Data	25
3.4 Variabel Penelitian	26
3.5 Definisi Operasional	26
3.5.1 <i>Financial Distress</i>	26
3.5.2 Ukuran Komite Audit	27
3.5.3 Independensi Komite Audit	27
3.5.4 Frekuensi Rapat Komite Audit.....	28
3.6 Metode Pengumpulan Data	29
3.7 Metode Analisis Data	29
3.7.1 Statistik Deskriptif.....	29
3.7.2 Uji Multikolinearitas	30
3.7.3 Regresi Logistik	30

3.7.3.1 Uji Kelayakan Model.....	31
3.7.3.2 Uji Kelayakan Keseluruhan Model	32
3.7.3.3 Signifikansi Koefisien Regresi	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Deskripsi Subjek dan Objek Penelitian	34
4.2 Hasil Penelitian	35
4.2.1 Statistik Deskriptif	35
4.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas	38
4.2.3 Hasil Uji Regresi Logistik	38
4.2.3.1 Uji Kelayakan Model.....	38
4.2.3.2 Uji Kelayakan Keseluruhan Model	39
4.2.3.3 Matriks Klasifikasi.....	41
4.2.3.4 Uji Signifikansi Koefisien Regresi	41
4.3 Pembahasan.....	43
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Keterbatasan.....	48
5.3 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 4.1 Tahapan Seleksi Sampel.....	35
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif	35
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	38
Tabel 4.4 Hasil Uji Kelayakan Model	39
Tabel 4.5 Hasil <i>Chi Square</i> (x^2).....	39
Tabel 4.6 Hasil <i>Cox and Snell's R² and Nagelkerke's R²</i>	40
Tabel 4.7 Hasil Matriks Klasifikasi	41
Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikansi Koefisien Regresi.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian..... 20



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Tabel 1 Data Variabel Dependen.....	52
Lampiran 1 : Tabel 2 Data Variabel Independen	56
Lampiran 2 : Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif.....	60
Lampiran 2 : Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas	60
Lampiran 2 : Tabel 3 Hasil Uji Kelayakan Model	61
Lampiran 2 : Tabel 4 Hasil Uji Kelayakan Keseluruhan Model	61
Lampiran 2 : Tabel 5 <i>Cox and Snell's R² and Nagelkerke's R²</i>	61
Lampiran 2 : Tabel 6 Hasil Matriks Klasifikasi	62
Lampiran 2 : Tabel 7 Hasil Uji Signifikansi Koefisien Regresi.....	62

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Luasnya aktivitas perusahaan ditambah dengan semakin ketatnya persaingan usaha membutuhkan suatu perencanaan dan pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan efektif. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan tata kelola yang baik untuk merumuskan keseluruhan strategi ke dalam suatu rencana dan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang agar dapat tetap bertahan dalam menghadapi lingkungan bisnis yang senantiasa berubah seperti sekarang ini.

Tata kelola perusahaan yang baik atau disebut *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap perusahaan dengan memperhitungkan banyak faktor, salah satunya dengan cara mengatur hubungan hak-kewajiban antara pemilik kepentingan internal dan eksternal untuk memaksimalkan aspek ekonomi dalam perusahaan demi meningkatkan kinerja keuangan serta nilai perusahaan meskipun dalam kenyataannya, kegiatan pengelolaan perusahaan pasti akan menemukan suatu kendala. Kendala demikian dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap kelangsungan hidup perusahaan dalam beberapa waktu mendatang dan ditandai dengan terjadinya kesulitan keuangan atau umum disebut sebagai *financial distress*.

Menurut Brigham dan Dave (2011), *financial distress* dibagi menjadi dua jenis yaitu kegagalan ekonomi (*economic failure*) dan kegagalan finansial (*financial failure*). Kegagalan ekonomi yaitu kondisi dimana perusahaan kehilangan uang atau kondisi disaat pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi biaya operasionalnya sendiri. Sedangkan kegagalan finansial dapat disebabkan oleh dua hal yaitu bangkrut secara teknis atau kondisi dimana perusahaan gagal membayar kewajibannya dengan total hutang yang lebih kecil dari total aset yang dimilikinya, serta bangkrut secara situasi atau kondisi dimana perusahaan gagal memenuhi kewajibannya kepada debitur karena perusahaan mengalami kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya. *Financial distress* adalah faktor utama penyebab perusahaan mengalami kebangkrutan usaha di masa mendatang.

Agoes (2006) menjelaskan bahwa kebangkrutan yang akan terjadi dalam sebuah perusahaan dapat diprediksi dengan memperhatikan beberapa indikator, antara lain; analisis aliran kas untuk saat ini dan saat mendatang, baik atau buruknya kualitas manajemen, serta kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya perusahaan. Indikator tersebut umum digunakan dalam menilai baik atau buruknya tata kelola yang dimiliki oleh perusahaan karena *financial distress* sering terjadi dalam sebuah perusahaan yang memiliki tata kelola yang buruk dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *financial distress* dapat dihindari jika perusahaan mampu mewujudkan pelaksanaan GCG dengan baik.

Rahmat *et al.* (2009) membuktikan bahwa salah satu bentuk GCG dalam perusahaan adalah dengan membentuk komite audit. Komite audit menjalankan peran dalam pengawasan operasi dan pengendalian internal perusahaan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham. Selain itu, komite audit diharapkan dapat memberi kontribusi pada rencana strategis perusahaan dan juga dapat menyiapkan input serta rekomendasi terhadap dewan direksi dengan mempertimbangkan setiap persoalan keuangan atau operasional perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan komite audit merupakan salah satu elemen kunci dalam struktur tata kelola perusahaan yang membantu mengendalikan dan mengawasi manajemen. Hal ini juga sejalan dengan dikeluarkannya Surat Edaran No. SE-03/PM/2000 oleh Bapepam.

Bapepam melalui surat edaran tersebut merekomendasikan perusahaan publik agar membentuk komite audit dan dijelaskan kemudian dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 bahwa komite audit mempunyai tugas membantu dewan komisaris dengan cara memberikan pendapat profesional yang independen terhadap laporan atau hal yang disampaikan direksi, melaksanakan audit internal, mengawasi pelaksanaan audit eksternal, mengidentifikasi hal yang perlu mendapat perhatian komisaris, dan melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan dewan komisaris. Seiring dengan berjalannya waktu, ketentuan dan peraturan mengenai komite audit diatur lebih lanjut dalam:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tahun 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum
- c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-05/MBU/2006 tentang Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Lebih jelasnya, dibentuknya komite audit didasarkan pada efektivitas pemahaman atas karakteristik komite audit. Karakteristik tersebut antara lain adalah ukuran, anggota independen, dan aktivitas dari komite audit. Ukuran komite audit berhubungan dengan struktur anggota komite audit dimana salah satu anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Anggota komite independen merupakan pemahaman bahwa harus terdapat anggota independen yang tidak terkait terhadap aktivitas perusahaan dalam struktur komite audit. Sedangkan, aktivitas komite audit diwujudkan melalui frekuensi pertemuan komite audit dalam satu tahun.

Adanya karakteristik komite audit tersebut diharapkan memiliki hubungan yang berpengaruh dalam mengurangi kemungkinan terjadinya *financial distress*. Menurut Salloum *et al.* (2014), komite audit dibentuk untuk mengawasi kegiatan audit internal dan mengevaluasi kinerja dan independensi audit eksternal, didukung dengan penemuannya bahwa komite audit dengan jumlah yang cukup banyak akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengawasan keuangan perusahaan dan kaitannya dengan *financial distress* dikarenakan tata kelola serta pengawasan perusahaan berjalan dengan lebih lebih efektif. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Charbet *et al.* (2014) yang membuktikan bahwa ukuran komite audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.

Salloum *et al.* (2014) membuktikan bahwa karakteristik komite audit yang kompeten memiliki kapasitas untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *financial distress* didukung dengan bukti bahwa independensi komite audit berbanding

negatif dengan *going concern* perusahaan yang mengalami *financial distress* karena semakin banyak jumlah anggota independen yang tergabung dalam komite audit akan menyebabkan semakin rendahnya kemungkinan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* akan menerima opini *going concern* dari auditor eksternal. Sedangkan hasil berbeda ditemukan oleh Rahmat *et al.* (2009) yang membuktikan bahwa jumlah anggota independen komite audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam membedakan perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.

Rahmat *et al.* (2009) juga menemukan adanya bukti bahwa kinerja keuangan perusahaan akan berhubungan dengan karakteristik dari komite audit yang baik dan berbanding negatif dengan *financial distress* yang juga didukung oleh penelitian Nuresa (2013) yang membuktikan bahwa frekuensi pertemuan komite audit memberikan pengaruh signifikan yang membedakan perusahaan yang mengalami *financial distress* dengan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. Namun sebaliknya, hasil berbeda diperoleh Treskawati (2014) yang membuktikan bahwa frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang berdampak pada kondisi keuangan suatu perusahaan dan hubungannya dengan *financial distress*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Salloum *et al.* (2014) terhadap bank di Lebanon. Didukung adanya hasil yang beragam atas penelitian mengenai topik yang bersangkutan dengan variabel bebas dan terikat yang sama. Maka, peneliti akan melakukan pengkajian kembali mengenai topic **“Pengaruh Karakteristik Komite Audit dalam Membedakan Kondisi *Financial Distress*”** dan mengurangi satu variabel bebas yaitu Keahlian Keuangan Komite Audit dikarenakan Rahmat *et al.* (2009), Kristanti (2012), Nuresa (2013), Salloum *et al.* (2014), Winarto (2016), dan Haziro (2017) menemukan adanya kekonsistenan dalam hasil penelitiannya yaitu bahwa keahlian keuangan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan dalam membedakan perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015 sampai 2017. Pemilihan sampel dan periode penelitian karena PricewaterhouseCoopers (PwC) menyatakan bahwa tahun 2015 sebagai tahun yang terburuk bagi sektor pertambangan karena adanya penurunan harga komoditas sebesar 25% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi demikian kemudian berimbas juga pada perusahaan tambang di Indonesia yang dibuktikan dengan tidak adanya perusahaan pertambangan dengan kapitalisasi pasar melebihi US\$4 miliar. Kondisi ini mendorong perusahaan pertambangan untuk berupaya keras meningkatkan produktivitasnya, bahkan beberapa diantaranya berjuang untuk bertahan dengan melakukan pelepasan aset dan berakhir dengan penutupan usaha. PwC juga menyatakan bahwa kapitalisasi pasar keseluruhan perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI turun dari Rp 255 triliun pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 161 triliun pada tanggal 31 Desember 2015. Selain itu karena sektor pertambangan merupakan salah satu sektor dengan total aset tertinggi, hal ini memberikan pengaruh pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama periode berjalan. Pada tahun yang sama diterbitkan juga peraturan baru oleh Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 yang mengatur tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal mengevaluasi efektivitas komite audit dengan temuan empiris yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan membedakan perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*?
2. Apakah komite audit independen berpengaruh signifikan membedakan perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*?

3. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan membedakan perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh ukuran komite audit terhadap perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.
2. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh komite audit independen terhadap perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.
3. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
Menambah pengetahuan dan pemahaman terkait disiplin ilmu akuntansi khususnya auditing yang telah didapatkan selama perkuliahan.
2. Manfaat secara praktis
 - Memberikan informasi terkait pentingnya fungsi komite audit sebagai salah satu unsur penting dalam penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) di suatu perusahaan.
 - Memberikan informasi terkait pentingnya peran komite audit untuk mencegah terjadinya *financial distress* dengan cara memberikan perbandingan antara perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. *Principal* adalah orang yang memberikan amanah dan *agent* adalah orang yang diberi amanah. Dalam hal ini, manajemen yang dipilih oleh pemegang saham, harus mempertanggungjawabkan semua aktifitasnya kepada pemegang saham (*stakeholder*). Mathius Tandiontong (2016:6) menggambarkan hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu orang atau lebih yang memperkerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut.

Agoes (2006) menyatakan teori keagenan terbentuk dari tiga asumsi sifat manusia yaitu: pada umumnya manusia mementingkan dirinya sendiri; daya pikir manusia akan persepsi masa datang yang terbatas; dan manusia yang selalu menghindari risiko. Dengan asumsi demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sifat dasar manusia dapat memicu seseorang untuk bertindak demi kepentingan pribadinya. Hal ini dapat memicu terjadinya konflik keagenan.

Mathius Tandiontong (2016:6) menjelaskan bahwa konflik keagenan dapat terjadi apabila terjadi perbedaan tujuan yang disebabkan karena kepentingan *principal* untuk memperoleh laba semakin bertambah sedangkan keinginan *agent* untuk menerima kepuasan berupa kompensasi juga bertambah, sehingga *agent* seringkali mengambil keputusan yang tidak dalam kepentingan milik *principal*. Hal ini mendasari dapat terjadinya *asymmetric information* yaitu informasi yang tidak seimbang dan disebabkan adanya distribusi informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak. Manajer selaku manajemen puncak yang telah diberi tugas oleh *principal* akan melakukan berbagai cara untuk memainkan segala strategi demi memperoleh nama dan juga bonus intensif yang besar dengan cara menampilkan laporan keuangan yang telah dipercantik sedemikian rupa kepada

principal. Laporan keuangan tersebut dapat menjadi masalah awal timbulnya berbagai macam masalah, salah satunya adalah *financial distress*. *Financial distress* dalam perusahaan dapat terjadi disaat perusahaan tidak lagi dapat memenuhi jumlah ataupun jadwal pembayaran atau ketika arus kas perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tidak akan dapat memenuhi kewajibannya (Brigham dan Dave, 2011). Hal ini disebabkan oleh pengambilan keputusan yang tidak tepat karena adanya konflik kepentingan.

Rahmat *et al.*, (2009) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) dapat meminimalisir terjadinya konflik kepentingan yang dapat menyebabkan bermacam masalah dalam perusahaan. Salah satu penerapan GCG adalah dengan keberadaan komite audit dalam perusahaan. Komite audit merupakan pihak yang dapat menjadi jembatan penghubung antara *principal* dan *agent* dalam mengelola dan mengatur keuangan perusahaan, termasuk menilai kelayakan strategi manajemen dalam upaya mengatasi kesulitan keuangan perusahaan.

2.1.2 *Financial Distress*

Financial distress adalah suatu indikasi awal terjadinya kebangkrutan pada sebuah perusahaan. Menurut Brigham dan Dave (2011), *financial distress* dimulai saat perusahaan tidak mampu memenuhi jadwal pembayaran atau ketika arus kas perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tidak akan dapat memenuhi kewajibannya. Platt dan Platt (2002) mendefinisikan *financial distress* sebagai tahap turunnya kondisi keuangan sebelum terjadinya likuidasi atau kebangkrutan.

Pandangan lain mengenai *financial distress*, mengutip dari penelitian Nuresa (2013) yang menjelaskan bahwa *financial distress* digolongkan ke dalam 4 (empat) istilah umum, yaitu:

a. *Economic Failure*

Economic failure atau kegagalan ekonomi adalah kondisi dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi semua total biaya termasuk biaya modal yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan usahanya. Perusahaan yang

mengalami *economic failure* dapat melanjutkan usahanya apabila kreditur mempunyai keinginan untuk memberikan modal tambahan dan pemilik perusahaan mau menerima pengembalian (*rate of return*) dengan tingkat di bawah pasar.

b. *Business Failure*

Business failure digunakan dalam menggambarkan berbagai kondisi bisnis yang tidak memuaskan. *Business failure* diartikan pada saat perusahaan berhenti beroperasi karena tidak mampu untuk menghasilkan keuntungan ataupun mendatangkan penghasilan yang cukup untuk melakukan pengembalian pinjamannya serta untuk menutupi pengeluarannya.

c. *Insolvency*

1) *Technical Insolvency*

Technical insolvency adalah kondisi dimana jumlah kas perusahaan kurang, sehingga menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di sisi lain, *technical insolvency* adalah gejala awal terjadinya kegagalan ekonomi yang menjadi perhentian pertama menuju bencana keuangan (*financial disaster*).

2) *Insolvency in Bankruptcy Sense*

Insolvency in bankruptcy sense adalah kondisi dimana total kewajiban perusahaan berada di atas total aset perusahaan. Dengan kata lain, nilai ekuitas perusahaan ada di titik negatif. Kondisi ini lebih serius dibandingkan dengan *technical insolvency* karena pada umumnya, hal ini merupakan tanda adanya *economic failure* yang terjadi dalam perusahaan dan mengarah pada terjadinya likuidasi. Perusahaan yang berada dalam kondisi ini, tidak perlu terlibat dalam tuntutan *legal bankruptcy*.

d. *Legal Bankruptcy*

Legal bankruptcy adalah kondisi dimana perusahaan dikatakan dan disahkan telah bangkrut secara hukum menurut peraturan undang-undang yang berlaku dalam suatu negara.

2.1.2.1 Faktor Penyebab *Financial Distress*

Agoes (2006) menjelaskan tentang beberapa faktor penyebab terjadinya *financial distress*, yaitu:

a. Kesulitan Arus Kas

Kesulitan arus kas terjadi saat penerimaan pendapatan perusahaan dari kegiatan operasionalnya tidak cukup untuk menutupi beban usaha yang timbul atas aktivitas operasi itu sendiri. Penyebab lainnya adalah karena adanya kesalahan manajemen ketika mengelola aliran kas yang dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan.

b. Besarnya Jumlah Utang

Besarnya jumlah utang terjadi saat perusahaan tidak mempunyai cukup dana untuk melunasi tagihan-tagihan yang timbul akibat ketidakmampuannya dalam membayar kewajiban yang timbul ketika tagihan jatuh tempo.

c. Kerugian dalam Kegiatan Operasional Perusahaan selama Beberapa Tahun

Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun dapat terjadi karena beban operasional perusahaan lebih besar daripada pendapatan yang diterimanya.

d. Faktor Eksternal Perusahaan

Faktor eksternal perusahaan adalah faktor diluar kendali perusahaan yang bersifat makro. Faktor ini dapat berpengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap keuangan perusahaan. Beberapa hal yang berpengaruh langsung pada biaya operasional perusahaan dapat berupa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta kenaikan biaya telepon, listrik, dan air.

2.1.3 *Good Corporate Governance* (GCG)

Effendi (2009) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang bertujuan untuk mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Agoes (2006) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. *Corporate Governance* disebut juga sebagai konsep yang ditetapkan untuk mencapai tujuan, pencapaian, kinerja perusahaan melalui *monitoring* dan menjamin akuntabilitas manajemen yang lebih transparan berdasarkan pada kerangka peraturan.

Sementara itu, definisi *Good Corporate Governance* menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peratusan perundang-undangan dan nilai etika.

2.1.3.1 Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Sutedi (2011:41) membagi unsur-unsur pelaksanaan *Good Corporate Governance* ke dalam dua kelompok yaitu:

- a. *Corporate Governance* – Internal Perusahaan, terdiri dari:
 - 1) Pemegang saham;
 - 2) Direksi;
 - 3) Dewan komisaris;
 - 4) Manajer;
 - 5) Karyawan atau serikat pekerja;
 - 6) Komite audit.
- b. *Corporate Governance* – Eksternal Perusahaan, terdiri dari:
 - 1) Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku;
 - 2) Investor;
 - 3) Institusi penyedia informasi;
 - 4) Institusi yang independen;
 - 5) Kreditur atau pemberi pinjaman;
 - 6) Akuntan publik;
 - 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas.

2.1.3.2 Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip *Good Corporate Governance* mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 adalah:

- a. *Transparency* (Transparansi), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana dengan efektif;
- c. *Fairness* (kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan;
- d. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. *Independency* (kemandirian), yaitu kondisi dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

2.1.3.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Agoes (2016), manfaat *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

- a. Para investor lebih memberikan kepercayaan terhadap perusahaan yang telah menerapkan *Good Corporate Governance*;
- b. Adanya indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dengan lemahnya tata kelola perusahaan. Ini berarti bahwa penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan dapat mengurangi risiko terjadinya krisis finansial;
- c. Praktik *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan jika diterapkan secara konsisten dan efektif.

Dapat disimpulkan bahwa, perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* akan lebih dapat bertahan dalam menghadapi lingkungan bisnis karena adanya kepercayaan lebih dari investor yang meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.4 Komite Audit

Berdasarkan kerangka dasar hukum yang berlaku di Indonesia, perusahaan *go public* diwajibkan untuk membentuk komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris. Ketentuan dan peraturan yang mengatur mengenai komite audit antara lain:

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- e. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tahun 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum
- f. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-05/MBU/2006 tentang Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Pasal 1 mendefinisikan komite audit sebagai komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP mendefinisikan komite audit sebagai komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris yang paling kurang terdiri dari satu orang komisaris independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan satu orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-05/MBU/2006 menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh komisaris dan dewan pengawas, bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris/dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggungjawab langsung kepada komisaris/dewan pengawas.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan dewan pengawas dengan tujuan untuk bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris, serta bertanggungjawab kepada dewan komisaris.

2.1.4.1 Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggungjawab paling sedikit meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emitem atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emitem atau perusahaan publik;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emitem atau perusahaan publik;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasar pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emitem atau perusahaan public tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emitem atau perusahaan publik;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emitem atau perusahaan publik; dan

- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi emitem atau perusahaan publik.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, dalam melaksanakan tugasnya, komite audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi emitem atau perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggungjawab komite audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris.

2.1.4.2 Ukuran Komite Audit

Agoes (2006) menyatakan bahwa secara umum, komite audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi kinerja kegiatan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit internal dan eksternal perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan komite audit dalam sebuah perusahaan akan membantu memastikan bahwa manajemen akan ataupun telah bertindak sesuai dengan kerangka peraturan yang harus dijalankan oleh perusahaan sehingga hal ini dapat mengurangi timbulnya konflik keagenan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, emitem atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. dijelaskan lebih lanjut bahwa:

- a. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris
- b. Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emitem atau perusahaan publik.
- c. Komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK. 04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emitem atau perusahaan publik.

2.1.4.3 Komite Audit Independen

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan independen sebagai merdeka atau berdiri sendiri. Berkaitan dengan tugas komite audit, maka hal ini berarti komite audit tidak terikat dengan pihak manapun dalam menjalankan tugasnya, sehingga dalam hal memberikan pendapat dan menyatakan sebuah permasalahan, penilaian komite audit dapat lebih objektif.

Anggota yang independen menjadi salah satu syarat dalam pembentukan komite audit. Hal ini tertuang dalam cuplikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, bahwa syarat keanggotaan komite audit adalah sebagai berikut:

- a. Anggota komite audit bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emitem atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Anggota komite audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emitem atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali komisaris independen;
- c. Anggota komite audit tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emitem atau perusahaan publik;
- d. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emitem atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- e. Anggota komite audit tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama emitem atau perusahaan publik;
- f. Anggota komite audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emitem atau perusahaan publik;

- g. Masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan dewan komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Berdasarkan cuplikan keputusan tersebut, anggota komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Independensi komite audit tidak dapat dipisahkan dari tanggungjawab professional dan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu dilakukan karena komite audit merupakan pihak penting yang menjembatani antara auditor eksternal dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan auditor internal.

2.1.4.4 Frekuensi Rapat Komite Audit

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi efektivitas komite audit adalah sering tidaknya diadakan pertemuan formal atau informal antara anggota komite audit. Penyelenggaraan Rapat Komite Audit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK. 04/2015, yaitu:

- a. Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- b. Rapat komite audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota;
- c. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- d. Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris.

Komite audit wajib membuat laporan kepada dewan komisaris atas setiap penugasan yang diberikan. Laporan yang dibuat adalah laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan emitem atau perusahaan publik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh hubungan antara karakteristik komite audit terhadap kondisi *financial distress* perusahaan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

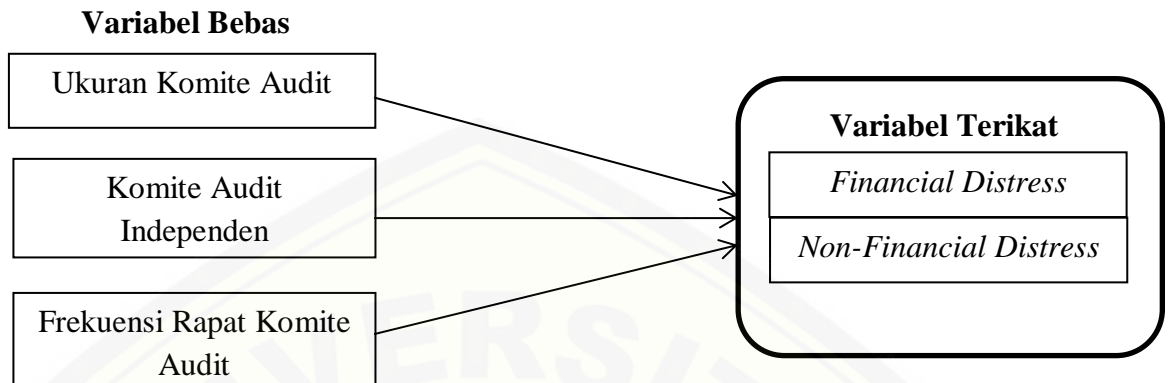
No.	Peneliti (tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rahmat <i>et al.</i> (2009)	<i>Audit Committee Characteristics in Financially Distressed and Non-Distressed Companies</i>	Ukuran, Independensi, Pertemuan, dan Pengetahuan Komite Audit	Adanya hubungan negatif yang signifikan antara pengetahuan komite audit dengan <i>financial distress</i>
2.	Kristanti (2012)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit pada Kondisi <i>Financial Distress</i> Perusahaan	Jumlah Komite Audit, Jumlah Komisaris Independen, Frekuensi Rapat, Keahlian Keuangan Komite Audit	Frekuensi rapat komite audit memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>financial distress</i>
3.	Nuresa (2013)	Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap <i>Financial Distress</i>	Ukuran, Independensi, Frekuensi Pertemuan, Pengetahuan Keuangan Komite Audit	Adanya hubungan negative signifikan antara frekuensi pertemuan dan pengetahuan keuangan komite audit terhadap <i>financial distress</i>

No.	Peneliti (tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Salloum <i>et al.</i> (2014)	<i>Audit Committee and Financial Distress in the Middle East Context</i>	Ukuran, Komposisi, Frekuensi Pertemuan, Keahlian Keuangan Komite Audit	Adanya hubungan negatif yang signifikan antara frekuensi pertemuan komite audit terhadap bank yang mengalami <i>financial distress</i>
5.	Wibisono (2017)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap <i>Financial Distress</i>	Ukuran, Kompetensi, dan Frekuensi Rapat Komite Audit	Ukuran komite audit, kompetensi komite audit, frekuensi rapat komite audit berpengaruh secara simultan terhadap <i>financial distress</i>

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik komite audit terhadap kondisi *financial distress* perusahaan. Karakteristik komite audit dalam penelitian ini diperoleh dengan membandingkan karakteristik komite audit pada perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. Karakteristik komite audit yang diteliti pada penelitian ini yaitu ukuran komite audit, independensi komite audit, dan frekuensi rapat komite audit terhadap pengaruhnya membedakan perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. Gambar berikut ini menunjukkan kerangka pemikiran yang akan menggambarkan alur pemahaman konsep pada penelitian ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis memperlihatkan hubungan tertentu antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, terdapat 3 hipotesis yang akan diuji, yaitu pengaruh ukuran anggota komite audit terhadap perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*, pengaruh jumlah komite audit independen terhadap perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*, dan pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. Lebih jelasnya, hipotesis tersebut disajikan sebagai berikut:

2.4.1 Ukuran Komite Audit terhadap Perusahaan yang mengalami *Financial Distress* dan Perusahaan yang tidak mengalami *Financial Distress*

Di Indonesia, pedoman ketentuan dan peraturan mengenai komite audit telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015. Dalam peraturan tersebut, terdapat pernyataan bahwa emitem atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit yang diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, dengan jumlah anggota komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emitem atau perusahaan publik. Jumlah komite audit yang lebih dari satu orang

dimaksudkan agar komite audit dalam melaksanakan tugasnya membantu dewan komisaris, dapat melaksanakan rapat dan bertukar pendapat antara satu anggota dengan yang lainnya. Hal ini menggambarkan hubungan keagenan bahwa dewan komisaris sebagai *principal* akan memperkerjakan komite audit sebagai *agent* untuk memberikan suatu jasa dan juga mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan.

Mengutip dari Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006), jumlah komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini berarti, jumlah komite audit dalam sebuah perusahaan tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil untuk menjaga fungsional komite audit itu sendiri. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan komite audit yang efektif dapat memberikan kebijakan yang berbeda dalam pencapaian laba akuntansi pada beberapa tahun ke depan sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya *financial distress* yang disebabkan oleh kinerja yang kurang baik.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanti (2012) dan Nuresa (2013) yang membuktikan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* perusahaan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat *et al.* (2009) yang juga membuktikan bahwa efektivitas komite audit akan meningkat apabila ukuran komite audit juga meningkat dan hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah keuangan pada perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ukuran komite audit membedakan perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*

2.4.2 Komite Audit Independen terhadap Perusahaan yang mengalami *Financial Distress* dan Perusahaan yang tidak mengalami *Financial Distress*

Anggota komite audit yang independen akan memberikan masukan dan keputusan yang lebih andal dalam tugasnya membantu dewan komisaris. Hal ini didasari karena setiap pendapat yang dibuat oleh anggota komite audit tidak memihak pada kepentingan siapapun. Ini berarti bahwa anggota komite audit yang independen tidak terikat dengan pihak manapun dalam menjalankan tugasnya, sehingga dalam hal memberikan pendapat dan menyatakan sebuah permasalahan, penilaian komite audit dapat lebih objektif. Anggota komite audit yang independen dimaksudkan untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan. Adanya anggota independen pada komite audit juga dapat menambah kepercayaan investor terhadap penyajian laporan keuangan dan akan mengurangi kemungkinan perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan. Anggota yang independen menjadi salah satu syarat dalam pembentukan komite audit yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015. Anggota yang independen akan mendukung diwujudkannya komite audit yang efektif dalam upayanya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik keagenan karena anggota yang independen tidak memiliki keterikatan antara *agent* maupun *principal*.

Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh atas keberadaan pihak-pihak independen pada susunan keanggotaan komite audit terhadap kinerja komite pada perusahaan yang tidak mengalami *financially distress*. Salloum *et al.* (2014) membuktikan bahwa kinerja komite audit akan lebih efektif apabila setiap anggotanya memiliki independensi (kebebasan) dalam menyampaikan pendapat di dalam rapat. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmat *et al.* (2009) yang membuktikan bahwa independensi komite audit berbanding negatif dengan *going concern* perusahaan yang mengalami *financial distress* karena semakin banyak jumlah anggota independen yang tergabung dalam komite audit akan menyebabkan semakin rendahnya kemungkinan bahwa perusahaan

yang mengalami *financial distress* akan menerima opini *going concern* dari auditor eksternal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Jumlah komite audit independen membedakan perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*

2.4.3 Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Perusahaan yang mengalami *Financial Distress* dan Perusahaan yang tidak mengalami *Financial Distress*

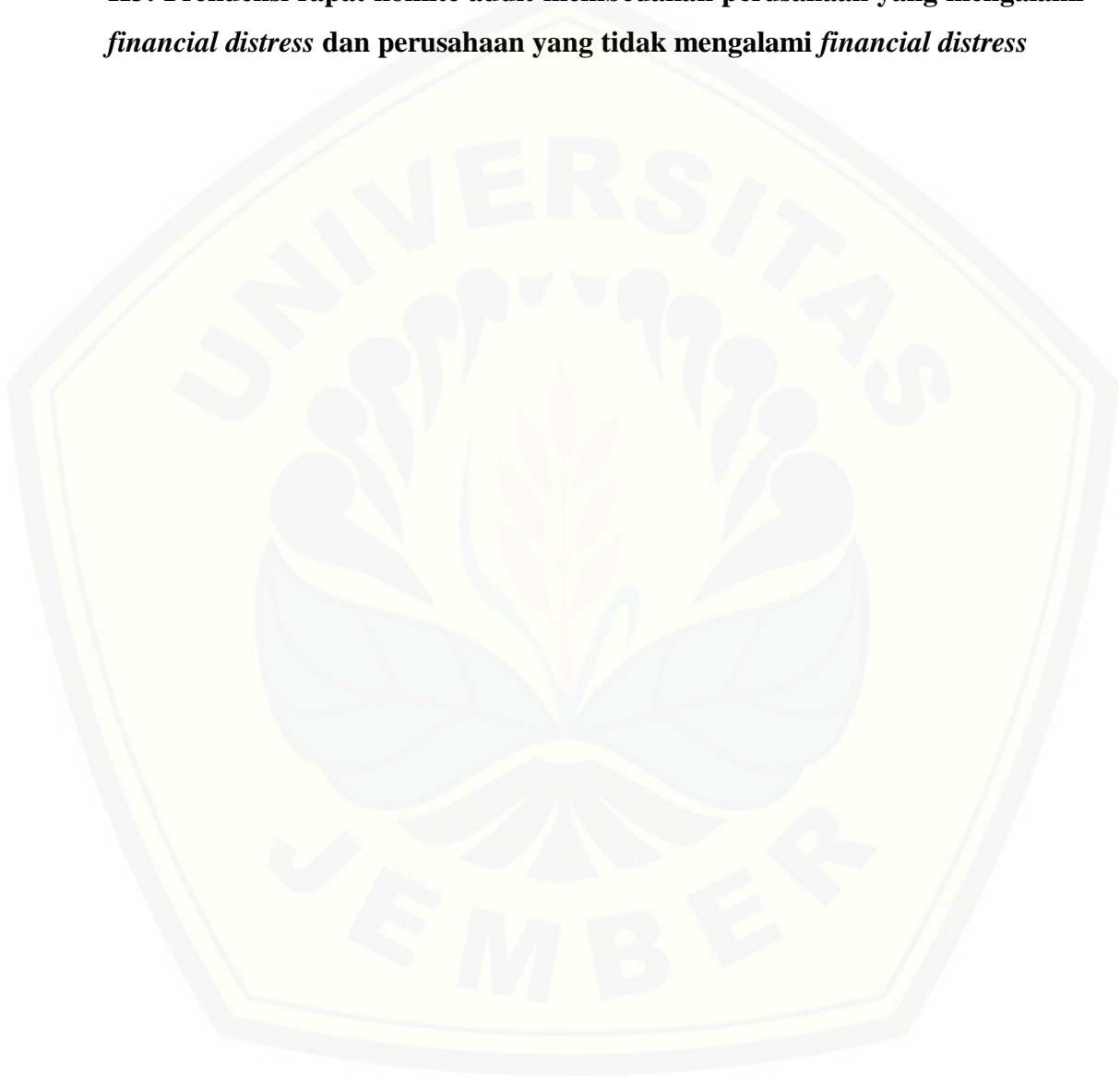
Faktor yang juga mempengaruhi efektivitas komite audit adalah sering tidaknya diadakan pertemuan formal ataupun informal antara anggota komite audit. Ketentuan rapat ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 yang menyatakan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan rapat komite audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota karena keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Rapat ini dilakukan dengan tujuan menghindari terjadinya perbedaan pendapat antara sesama anggota komite audit dan untuk memperoleh pendapat final yang nantinya akan disampaikan kepada dewan komisaris karena dijelaskan dalam teori keagenan bahwa komite audit sebagai *agent* harus mempertanggungjawabkan pendapatnya kepada dewan komisaris sebagai *principal*.

Penelitian Nuresa (2013) dan Salloum *et al.* (2014) menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit akan memberikan pengaruh terhadap kontrol internal keuangan perusahaan. Rahmat *et al.* (2009) mengungkapkan bahwa komite audit yang menyelenggarakan frekuensi pertemuan yang lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif, meliputi persiapan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan pada perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Rahmat *et al.* (2009) yang membuktikan bahwa komite

audit perusahaan yang mengalami *financial distress* tidak mengadakan rapat sesering perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Frekuensi rapat komite audit membedakan perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan bentuk penelitian asosiatif yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan pendekatan kuantitatif, penelitian ini dinamakan penelitian konfirmatori yang bertujuan untuk melakukan konfirmasi teori untuk berlakunya pada suatu objek penelitian (tertentu), baik untuk eksplanasi atau prediksi.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan sampel dari penelitian ini merupakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017 dan terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress (non-financially distressed)*. Dalam menentukan sampel yang akan digunakan, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2017;
- b. Perusahaan pertambangan yang menyajikan laporan keuangan 2015-2017;
- c. Perusahaan pertambangan yang memiliki komite audit dan menyajikan data laporan komite audit dalam laporan tahunan secara lengkap selama periode 2015-2017.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan auditan untuk menghitung nilai ROA perusahaan dan laporan tahunan yang mencakup data tentang ukuran komite audit, komite audit independen, dan frekuensi rapat komite audit. Sumber data sekunder ini didapatkan dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.com).

3.4 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *financial distress* dengan pembanding yaitu perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah karakteristik komite audit yang meliputi ukuran komite audit, komite audit independen, dan frekuensi rapat komite audit.

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang variabel-variabel penelitian yang digunakan. Definisi operasional dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 *Financial Distress*

Financial distress yang terjadi pada perusahaan dalam penelitian ini merupakan variabel terikat (*dependent variable*). *Financial distress* adalah ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan atau likuidasi (Kartikawati, 2008). Dalam mengidentifikasi terjadinya *financial distress*, peneliti menggunakan *Return On Assets* (ROA) yang mengacu pada penelitian Salloum *et al.* (2014) dan didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Kurniasari (2013). Angka ROA dalam penelitian ini menggunakan angka ROA yang telah tersedia dalam laporan keuangan perusahaan. *Return On Assets* (ROA) dapat dihitung dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Ket:

ROA: *Return on Assets*

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan variabel *dummy* untuk mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif. Diberikan nilai 1 (satu) untuk perusahaan yang mengalami *financial distress* dan nilai 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.

3.5.2 Ukuran Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, terdapat peraturan bahwa emitem atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit yang diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, dengan jumlah anggota komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emitem atau perusahaan publik. Dalam mengidentifikasi ukuran komite audit dalam penelitian ini, peneliti mengukurnya dengan menghitung jumlah anggota dalam komite audit.

$$ACSIZE = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

Keterangan:

ACSIZE: Singkatan dari *Audit Committee Size* atau ukuran komite audit

3.5.3 Komite Audit Independen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, bahwa salah satu syarat keanggotaan komite audit adalah adanya anggota komite audit independen dengan syarat bahwa anggota komite audit bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emitem atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Anggota komite audit juga bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emitem atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali komisaris independen.

Dalam hal ini, komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara adil dengan adanya anggota yang independen. Independensi yang dimiliki oleh anggota komite audit tidak dapat dipisahkan dari moralitas yang melandasi integritasnya. Auditor wajib bersikap independen, artinya tidak dipengaruhi apapun dan siapapun, karena dia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (Heryansyah, 2014).

Dalam mengidentifikasi komite audit independen dalam penelitian ini, peneliti mengukurnya dengan cara menghitung jumlah anggota independen dalam komite audit yang tersaji dalam laporan aktivitas komite audit dalam laporan tahunan perusahaan publik.

$$ACINDP = \sum \text{Anggota Komite Audit Independen}$$

Keterangan:

ACINDP: Singkatan dari *Audit Committee Independent* atau independensi komite audit

3.5.4 Frekuensi Rapat Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, komite audit harus mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan bahwa rapat komite audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota. Dalam mengidentifikasi frekuensi rapat komite audit dalam penelitian ini, peneliti mengukurnya dengan menghitung banyaknya rapat yang diadakan komite audit dalam satu tahun yang tersaji dalam laporan aktivitas komite audit dalam laporan tahunan perusahaan publik.

$$ACMEET = \sum \text{Frekuensi Rapat Komite Audit}$$

Keterangan:

ACMEET: Singkatan dari *Audit Committee Meeting* atau pertemuan komite audit

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mempelajari data-data tertulis seperti laporan keuangan, laporan tahunan yang berisi laporan aktivitas komite audit, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan kepentingan penelitian. Sumber dokumentasi data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.com).

3.7 Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel bebas (*independent variable*) terhadap perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan (*non-financially distress*).

3.7.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah nilai-nilai statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan variabel-variabel dalam suatu penelitian. Statistik deskriptif penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik.

Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi untuk menggambarkan variabel ukuran komite audit, jumlah komite audit independen, dan frekuensi rapat komite audit. Data yang diteliti akan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu semua sampel perusahaan baik yang mengalami maupun tidak mengalami *financial distress*, hanya perusahaan yang mengalami *financial distress*, dan hanya perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.

3.7.2 Uji Multikolinieritas

Penelitian ini menggunakan uji regresi logistik, di mana regresi logistik tidak mensyaratkan data yang berdistribusi normal seperti pada analisis diskriminan. Multikolinieritas yang terjadi diantara variabel bebas bisa membuat estimasi menjadi bias dan *standard error* yang tinggi (Hidayat, 2011). Sehingga diperlukan Uji Multikolinieritas dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* \leq 0,10 atau sama dengan nilai *VIF* \leq 10.

3.7.3 Regresi Logistik

Untuk suatu media yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui apakah suatu hipotesis benar atau tidak atau suatu variabel X terhadap variabel Y ada pengaruh atau tidak ada pengaruh maka harus dilakukan pengujian hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik (*logistic regression*) untuk meneliti hubungan antara variabel dimana variabel terikat berupa data biner atau data yang memiliki dua kategori saja, yaitu kategori 1 (satu) dan 0 (nol).

Regresi logistik umumnya terdiri dari berbagai macam variabel bebas baik numerik maupun kategorik, termasuk *dummy*. Pengujian hipotesis dengan analisis regresi logistik dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS. Teknis analisis ini tidak memerlukan uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Nuresa, 2013).

Persamaan yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln \frac{FD}{1 - FD} &= DISTRESSEDi \\ &= \beta_0 + \beta_1 ACSIZE + \beta_2 ACINDPi + \beta_3 ACMEET + \varepsilon_i \end{aligned}$$

Keterangan:

DISTRESSED = Nilai 1 (satu) untuk perusahaan *financial distress* dan nilai 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*

β_0 = Konstanta

ACSIZE = *Audit Committee Size* atau jumlah seluruh anggota audit

ACINDP = *Independent Audit Committee* atau jumlah anggota komite audit yang independen

ACMEET = *Frequency of Audit Committee Meeting* atau frekuensi rapat komite audit selama satu tahun

ϵ_i = *Disturbance Error*

Pada model regresi logistik, terdapat kondisi yang perlu diperhatikan dari output model tersebut. Kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

Menurut Nuresa (2013), *goodness of fit test* dapat dilakukan dengan memperhatikan output dari *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*, dengan hipotesis:

H0: Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H1: Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai yang diteliti, sehingga *goodness fit model* tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai yang diteliti. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow* lebih besar dari α (0,05) maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya.

2. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

a. *Chi Square* (x^2)

Dalam menilai *Overall Fit Model*, dapat dilakukan dengan menghitung nilai *Chi Square* (x^2). Tes statistik *Chi Square* (x^2) digunakan berdasar pada fungsi *likelihood* pada estimasi model regresi. *Likelihood* (L) dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. L ditransformasikan menjadi $-2\log L$ untuk menguji hipotesis nol dan alternatif. Penggunaan nilai x^2 untuk keseluruhan model terhadap data dilakukan dengan membandingkan $-2\log likelihood$ awal (hasil *block number* 0) dengan nilai $-2\log likelihood$ hasil *block number* 1. Dengan kata lain, nilai *Chi Square* didapat dari nilai $-2\log L_1 - 2\log L_0$. Apabila terjadi penurunan, maka model tersebut menunjukkan model regresi yang baik.

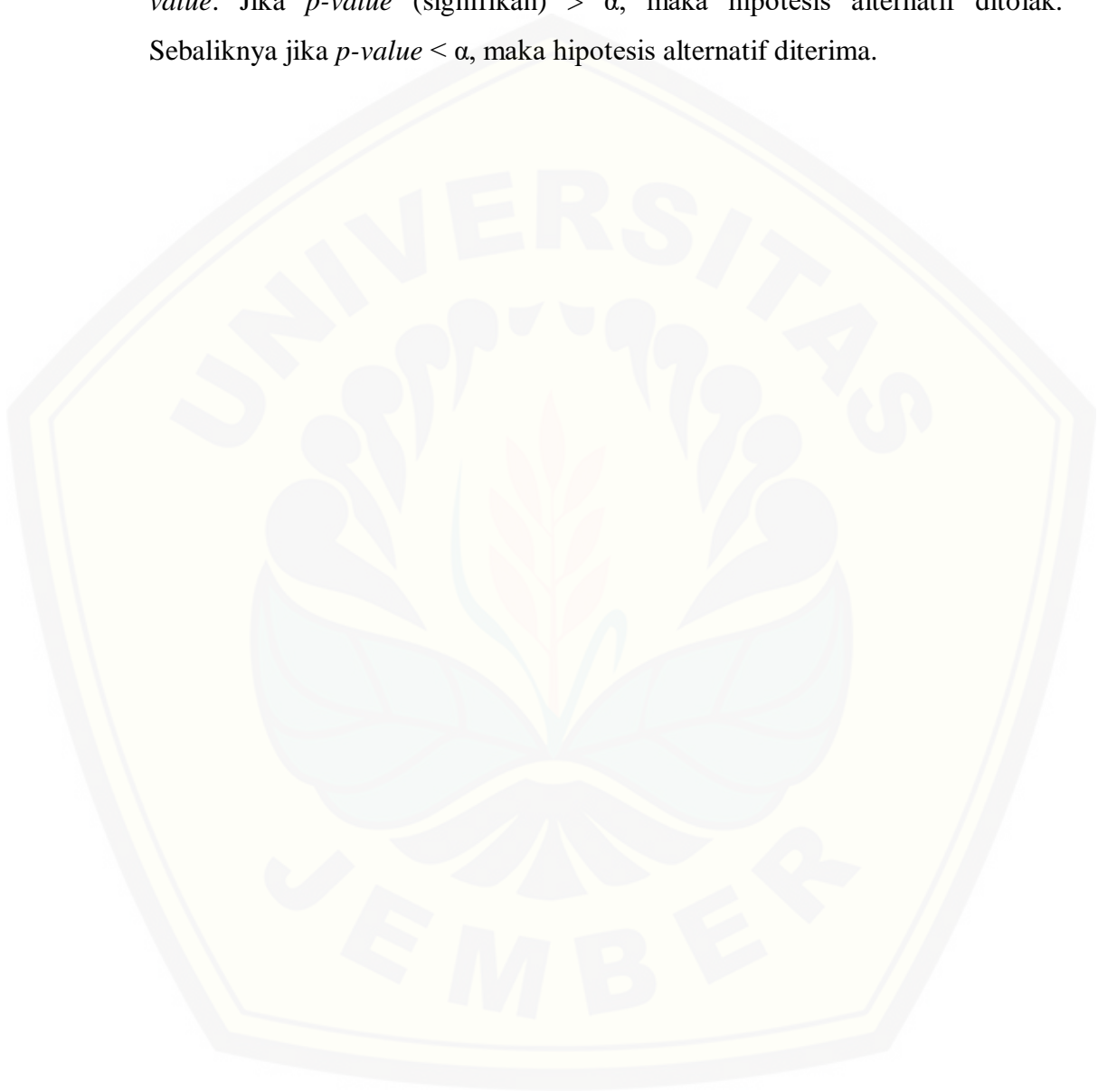
b. *Cox and Snell's R²* and *Nagelkerke's R²*

Cox and Snell's R² merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R^2 pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan. Untuk mendapatkan koefisien determinasi yang dapat diinterpretasikan seperti nilai R^2 pada *multiple regression*, maka digunakan *Nagelkerke's R²*. *Nagelkerke's R²* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell R²* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kombinasi variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikatnya. Caranya adalah dengan membagi nilai *Cox and Snell R²* dengan nilai maksimumnya (Nuresa, 2013).

3. Signifikansi Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan berada pada kondisi *financial distress*. Koefisien regresi logistik dapat ditentukan dengan menggunakan *p-value* (*probability value*).

- a. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5% (0,05)
- b. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi *p-value*. Jika *p-value* (signifikan) $> \alpha$, maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika *p-value* $< \alpha$, maka hipotesis alternatif diterima.



BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji tentang pengaruh karakteristik komite audit terhadap kondisi *financial distress* perusahaan. Data sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2017. Analisis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi dengan bantuan program SPSS versi 22. Hasil uji dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut:

1. Hasil uji dan analisis menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam membedakan perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. Hasil ini mengindikasikan bahwa ukuran komite audit tidak menjamin perusahaan tidak akan mengalami kondisi *financial distress*. Kondisi *financial distress* tidak berhubungan dengan banyak atau sedikitnya anggota komite audit dalam sebuah perusahaan. kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar dari faktor yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Hasil uji dan analisis menunjukkan bahwa komite audit independen tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam membedakan perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. Hasil ini mengindikasikan bahwa jumlah komite audit independen yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emitem atau perusahaan publik tidak mengurangi resiko perusahaan akan mengalami kondisi *financial distress* dikarenakan fungsinya yang terbatas hanya sebagai pengawas dan pemberi saran, serta tidak mempunyai wewenang dalam hal pengambilan keputusan. Kondisi *financial distress* tidak berhubungan dengan banyak atau sedikitnya anggota komite audit dalam sebuah perusahaan. kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar dari faktor yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Hasil uji dan analisis menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit memberikan pengaruh signifikan dengan hubungan negatif dalam membedakan perusahaan yang mengalami *financial distress* dan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*. Pertemuan komite audit dapat menjadi tempat dimana komite audit memberikan *review*, masukan, dan saran terhadap kinerja perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin seringnya frekuensi pertemuan yang dilakukan komite audit akan mengurangi kemungkinan terjadinya kondisi *financial distress*. Perusahaan pertambangan yang tercatat mengalami *financial distress* adalah perusahaan yang rata-rata hanya melakukan 5 (lima) kali pertemuan dalam satu tahun, sedangkan perusahaan yang tidak mengalami *financial distress* rata-rata melakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali pertemuan dalam satu tahun audit. Semakin seringnya perusahaan melakukan pertemuan komite audit dapat menjadi faktor yang berpengaruh mengurangi kemungkinan terjadinya *financial distress*.

5.2 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Tidak semua populasi perusahaan pertambangan mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan yang berisi laporan tentang profil serta kegiatan komite audit.
2. Variabel ukuran komite audit dan variabel komite audit independen tidak memiliki keragaman dalam hal jumlah dan nilainya yang cenderung sama untuk semua perusahaan.

5.3 Saran

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan setelah dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Perusahaan
Menambah jumlah frekuensi rapat komite audit dengan harapan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *financial distress*.

2. Untuk Penelitian Selanjutnya

- a. Menambah variabel lain dalam mengukur karakteristik komite audit, misalnya pengalaman kerja anggota komite audit.
- b. Menambah periode penelitian menjadi lebih panjang supaya hasil yang didapatkan pada saat penelitian dapat mencerminkan kondisi dalam jangka waktu yang lebih lama.
- c. Menggunakan proksi lain dalam acuan mengukur variabel *financial distress*, misalnya Z-Score.



DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Soekrisno. 2006. *Peranan Internal Audit Department, Enterprises Risk Management, dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud*. Jakarta: Salemba Empat.
- Brigham, E. F. dan Dave, P. R. 2011. *Intermediate Financial Management*. Eight Edition. South-Western, Mason: Ohio USA.
- Charbet, J. V. dan T. L. Neal. 2014. Audit Committee Characteristics and Auditor Dismissal. *The Accounting Review*, Vol. 78.
- Effendi, Muh. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haziro. 2017. Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Financial Distress. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Heryansyah. 2014. Tanggung Jawab Dasar Auditor. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-05/MBU Tahun 2006. Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara. Jakarta.
- Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM Tahun 2004. *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. Jakarta: Bapepam.
- Kristanti. 2012. Pengaruh Karakteristik Komite Audit pada Kondisi Financial Distress Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 1 No. 2.
- Kurniasari. 2013. Financial Distress dan Pengaruhnya pada Nilai Perusahaan. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada.
- Nuresa, 2013. Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Financial Distress. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Pedoman Umum Good Corporate Governance Tahun 2006. Gedung Bursa Efek Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04 Tahun 2014. *Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04 Tahun 2015. *Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU Tahun 2011. *Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta.

- Platt, H. D., & Platt, M. B., 2002. Predicting Corporate Financial Distress: Reflections on Choice-Based Sample Bias. *Journal of Economic and Finance* 99-184.
- PricewaterhouseCoopers. 2016. Tahun 2015 Sebagai Tahun Terburuk bagi Sektor Pertambangan. <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2016/indonesian/pwc---tahun-2015-sebagai-tahun-terburuk-bagi-sektor-pertambangan.html>. [Diakses pada Oktober 2019].
- Rahmat, M. M., Iskandar, T. M., & Saleh, N.M. 2009. Audit Committee Characteristics in Financially Distressed and Non Distressed Companies. *Managerial Auditing Journal* 624-638.
- Salloum, C., Azzi, G., & Gebrayeil, E. 2014. Audit Committee and Financial Distress in the Middle East Context: Evidence of the Lebanese Financial Institutions. *International Strategic Management Review* 39-45.
- Sedarmayanti dan Hidayat, S. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP Tahun 2013. *Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM Tahun 2000. *Pelaksanaan Pembentukan Komite Audit bagi Perusahaan Go Public*. Jakarta: Bapepam.
- Sutedi, Andrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tandiontong, Mathius. 2016. *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: Alfabeta.
- Treskawati. 2014. Pengaruh Efektivitas Komite Audit pada Financial Distress. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Wibisono, Azalea. 2017. Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Financial Distress. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Winarto. 2016. Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Financial Distress. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Lampung.

LAMPIRAN 1

Tabel 1

Data Variabel Dependen			
No	Nama Perusahaan	ROA	Nilai
1	Adaro Energy Tbk.	2.53	0
2	Adaro Energy Tbk.	5.22	0
3	Adaro Energy Tbk.	7.87	0
4	Aneka Tambang Tbk.	-4.75	1
5	Aneka Tambang Tbk.	0.22	0
6	Aneka Tambang Tbk.	0.45	0
7	Apexindo Pratama Duta Tbk.	2.8	0
8	Apexindo Pratama Duta Tbk.	-2.87	1
9	Apexindo Pratama Duta Tbk.	-17.75	1
10	Atlas Resource Tbk.	-7.38	1
11	Atlas Resource Tbk.	-7.72	1
12	Atlas Resource Tbk.	-5.11	1
13	Ratu Prabu Energi Tbk.	0.73	0
14	Ratu Prabu Energi Tbk.	0.35	0
15	Ratu Prabu Energi Tbk.	1.15	0
16	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.	-2.79	1
17	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.	-13.5	1
18	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.	2.89	0
19	Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk.	-27.43	1
20	Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk.	17.07	0
21	Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk.	5.42	0
22	Bumi Resource Mineral Tbk.	-3.08	1
23	Bumi Resource Mineral Tbk.	-53.25	1
24	Bumi Resource Mineral Tbk.	-28.57	1
25	Baramulti Suksessarana Tbk.	15.17	0
26	Baramulti Suksessarana Tbk.	14.9	0
27	Baramulti Suksessarana Tbk.	39.41	0
28	Bumi Resource Tbk.	-64.39	1
29	Bumi Resource Tbk.	3.88	0
30	Bumi Resource Tbk.	6.57	0
31	Bayan Resource Tbk.	-8.72	1
32	Bayan Resource Tbk.	2.18	0
33	Bayan Resource Tbk.	38.03	0
34	Cita Mineral Investindo Tbk.	-12.2	1

35	Cita Mineral Investindo Tbk.	-9.73	1
36	Cita Mineral Investindo Tbk.	1.77	0
37	Cakra Mineral Tbk.	-5.56	1
38	Cakra Mineral Tbk.	-5.98	1
39	Cakra Mineral Tbk.	-45.67	1
40	Citatah Tbk.	0.32	0
41	Citatah Tbk.	3.39	0
42	Citatah Tbk.	0.67	0
43	Darma Henwa Tbk	0.12	0
44	Darma Henwa Tbk	0.14	0
45	Darma Henwa Tbk	0.69	0
46	Central Omega Resouces Tbk.	-2.39	1
47	Central Omega Resouces Tbk.	-4.65	1
48	Central Omega Resouces Tbk.	-1.97	1
49	Delta Dunia Makmur Tbk.	-1	1
50	Delta Dunia Makmur Tbk.	4.2	0
51	Delta Dunia Makmur Tbk.	4.94	0
52	Dian Swastatika Sentosa Tbk.	-0.39	1
53	Dian Swastatika Sentosa Tbk.	0.02	0
54	Dian Swastatika Sentosa Tbk.	4.69	0
55	Elnusa Tbk.	8.62	0
56	Elnusa Tbk.	7.54	0
57	Elnusa Tbk.	5.16	0
58	Energi Mega Persada Tbk.	-18.96	1
59	Energi Mega Persada Tbk.	-41.59	1
60	Energi Mega Persada Tbk.	1.95	0
61	Surya Esa Perkasa Tbk.	1.75	0
62	Surya Esa Perkasa Tbk.	0.02	0
63	Surya Esa Perkasa Tbk.	0.27	0
64	Alfa Energi Investama Tbk.	-0.23	1
65	Golden Energy Mines Tbk.	0.57	0
66	Golden Energy Mines Tbk.	9.26	0
67	Golden Energy Mines Tbk.	20.43	0
68	Garda Tujuh Buana Tbk.	-26.67	1
69	Garda Tujuh Buana Tbk.	-9.44	1
70	Garda Tujuh Buana Tbk.	0.06	0
71	Harum Energy Tbk.	-4.99	1
72	Harum Energy Tbk.	4.35	0
73	Harum Energy Tbk.	12.13	0

74	Vale Indonesia Tbk.	2.21	0
75	Vale Indonesia Tbk.	0.09	0
76	Vale Indonesia Tbk.	-0.7	1
77	Indika Energy Tbk.	-3.57	1
78	Indika Energy Tbk.	-5.72	1
79	Indika Energy Tbk.	8.85	0
80	Indo Tambangraya Megah Tbk.	5.36	0
81	Indo Tambangraya Megah Tbk.	10.8	0
82	Indo Tambangraya Megah Tbk.	18.6	0
83	Resource Alam Indonesia Tbk.	5.76	0
84	Resource Alam Indonesia Tbk.	9.6	0
85	Resource Alam Indonesia Tbk.	12.79	0
86	Mitrabara Adiperdana Tbk.	31.75	0
87	Mitrabara Adiperdana Tbk.	23.3	0
88	Mitrabara Adiperdana Tbk.	36.47	0
89	Merdeka Copper Gold Tbk.	-2.93	1
90	Merdeka Copper Gold Tbk.	-0.91	1
91	Merdeka Copper Gold Tbk.	10.29	0
92	Medco Energi Internasional Tbk.	-6.4	1
93	Medco Energi Internasional Tbk.	5.2	0
94	Medco Energi Internasional Tbk.	2.55	0
95	Mitra Investindo Tbk.	-72.13	1
96	Mitra Investindo Tbk.	-10.18	1
97	Mitra Investindo Tbk.	-9.99	1
98	Samindo Resources Tbk.	15.34	0
99	Samindo Resources Tbk.	14.44	0
100	Samindo Resources Tbk.	9.04	0
101	Perdana Karya Perkasa Tbk.	-36.17	1
102	Perdana Karya Perkasa Tbk.	-8.67	1
103	Perdana Karya Perkasa Tbk.	-7.6	1
104	J Resources Asia Pasifik Tbk.	3.77	0
105	J Resources Asia Pasifik Tbk.	2.61	0
106	J Resources Asia Pasifik Tbk.	4.35	0
107	Petrosea Tbk.	-2.98	1
108	Petrosea Tbk.	-1.99	1
109	Petrosea Tbk.	1.9	0
110	Radiant Utama Interinsco Tbk.	3.78	0
111	Radiant Utama Interinsco Tbk.	2.66	0
112	Radiant Utama Interinsco Tbk.	2.18	0

113	Golden Eagle Energy Tbk.	-8.5	1
114	Golden Eagle Energy Tbk.	-2.87	1
115	Golden Eagle Energy Tbk.	5.52	1
116	SMR Utama Tbk.	-3.93	1
117	SMR Utama Tbk.	-9.31	1
118	SMR Utama Tbk.	1.61	0
119	Timah Tbk.	1.09	0
120	Timah Tbk.	2.64	0
121	Timah Tbk.	4.23	0
122	Toba Bara Sejahtera	9.11	0
123	Toba Bara Sejahtera	5.58	0
124	Toba Bara Sejahtera	11.88	0
125	Trada Alam Minera Tbk.	-37.17	1
126	Trada Alam Minera Tbk.	-12.24	1
127	Trada Alam Minera Tbk.	0.1	0
128	Kapuas Prima Coal Tbk.	6.35	0

Tabel 2

Data Variabel Independen				
No	Nama Perusahaan	ACSIZE	ACINDP	ACMEET
1	Adaro Energy Tbk.	3	1	25
2	Adaro Energy Tbk.	3	1	24
3	Adaro Energy Tbk.	3	1	24
4	Aneka Tambang Tbk.	4	1	35
5	Aneka Tambang Tbk.	4	2	18
6	Aneka Tambang Tbk.	4	2	23
7	Apexindo Pratama Duta Tbk.	3	1	7
8	Apexindo Pratama Duta Tbk.	3	1	5
9	Apexindo Pratama Duta Tbk.	3	1	5
10	Atlas Resource Tbk.	2	0	4
11	Atlas Resource Tbk.	3	1	6
12	Atlas Resource Tbk.	3	1	6
13	Ratu Prabu Energi Tbk.	2	0	5
14	Ratu Prabu Energi Tbk.	3	1	5
15	Ratu Prabu Energi Tbk.	3	1	5
16	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.	4	1	5
17	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.	4	1	4
18	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.	4	1	5
19	Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk.	2	0	9
20	Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk.	1	0	12
21	Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk.	1	0	12
22	Bumi Resource Mineral Tbk.	4	1	4
23	Bumi Resource Mineral Tbk.	4	2	4
24	Bumi Resource Mineral Tbk.	4	1	4
25	Baramulti Suksessarana Tbk.	3	1	12
26	Baramulti Suksessarana Tbk.	3	1	9
27	Baramulti Suksessarana Tbk.	3	1	8
28	Bumi Resource Tbk.	3	0	4
29	Bumi Resource Tbk.	3	1	6
30	Bumi Resource Tbk.	3	1	8
31	Bayan Resource Tbk.	4	1	10
32	Bayan Resource Tbk.	4	2	12
33	Bayan Resource Tbk.	4	2	12
34	Cita Mineral Investindo Tbk.	3	1	12
35	Cita Mineral Investindo Tbk.	3	1	12

36	Cita Mineral Investindo Tbk.	3	1	14
37	Cakra Mineral Tbk.	3	1	5
38	Cakra Mineral Tbk.	3	1	4
39	Cakra Mineral Tbk.	3	1	4
40	Citatah Tbk.	3	0	6
41	Citatah Tbk.	3	1	6
42	Citatah Tbk.	3	1	7
43	Darma Henwa Tbk	3	1	11
44	Darma Henwa Tbk	3	1	10
45	Darma Henwa Tbk	3	1	12
46	Central Omega Resouces Tbk.	3	1	8
47	Central Omega Resouces Tbk.	3	1	8
48	Central Omega Resouces Tbk.	3	1	8
49	Delta Dunia Makmur Tbk.	3	1	8
50	Delta Dunia Makmur Tbk.	3	1	12
51	Delta Dunia Makmur Tbk.	3	1	12
52	Dian Swastatika Sentosa Tbk.	3	1	10
53	Dian Swastatika Sentosa Tbk.	3	1	12
54	Dian Swastatika Sentosa Tbk.	3	1	12
55	Elnusa Tbk.	3	1	13
56	Elnusa Tbk.	3	1	13
57	Elnusa Tbk.	3	1	12
58	Energi Mega Persada Tbk.	3	1	4
59	Energi Mega Persada Tbk.	3	1	4
60	Energi Mega Persada Tbk.	3	1	5
61	Surya Esa Perkasa Tbk.	3	1	4
62	Surya Esa Perkasa Tbk.	3	1	4
63	Surya Esa Perkasa Tbk.	3	1	5
64	Alfa Energi Investama Tbk.	3	1	5
65	Golden Energy Mines Tbk.	3	1	4
66	Golden Energy Mines Tbk.	3	1	8
67	Golden Energy Mines Tbk.	3	1	8
68	Garda Tujuh Buana Tbk.	3	1	4
69	Garda Tujuh Buana Tbk.	3	1	4
70	Garda Tujuh Buana Tbk.	3	1	6
71	Harum Energy Tbk.	3	1	5
72	Harum Energy Tbk.	3	1	5
73	Harum Energy Tbk.	3	1	5
74	Vale Indonesia Tbk.	3	1	5

75	Vale Indonesia Tbk.	3	1	6
76	Vale Indonesia Tbk.	3	1	6
77	Indika Energy Tbk.	3	1	4
78	Indika Energy Tbk.	3	1	4
79	Indika Energy Tbk.	3	1	6
80	Indo Tambangraya Megah Tbk.	3	1	10
81	Indo Tambangraya Megah Tbk.	3	1	8
82	Indo Tambangraya Megah Tbk.	3	1	8
83	Resource Alam Indonesia Tbk.	3	1	8
84	Resource Alam Indonesia Tbk.	3	1	8
85	Resource Alam Indonesia Tbk.	3	1	7
86	Mitrabara Adiperdana Tbk.	3	1	4
87	Mitrabara Adiperdana Tbk.	3	1	4
88	Mitrabara Adiperdana Tbk.	3	1	5
89	Merdeka Copper Gold Tbk.	3	1	2
90	Merdeka Copper Gold Tbk.	3	1	4
91	Merdeka Copper Gold Tbk.	3	1	4
92	Medco Energi Internasional Tbk.	3	1	5
93	Medco Energi Internasional Tbk.	3	1	5
94	Medco Energi Internasional Tbk.	3	1	5
95	Mitra Investindo Tbk.	3	1	4
96	Mitra Investindo Tbk.	3	1	4
97	Mitra Investindo Tbk.	3	1	4
98	Samindo Resources Tbk.	3	1	5
99	Samindo Resources Tbk.	3	1	5
100	Samindo Resources Tbk.	3	1	6
101	Perdana Karya Perkasa Tbk.	3	0	3
102	Perdana Karya Perkasa Tbk.	3	1	4
103	Perdana Karya Perkasa Tbk.	3	1	4
104	J Resources Asia Pasifik Tbk.	4	1	8
105	J Resources Asia Pasifik Tbk.	4	1	8
106	J Resources Asia Pasifik Tbk.	4	1	8
107	Petrosea Tbk.	3	1	5
108	Petrosea Tbk.	3	1	6
109	Petrosea Tbk.	3	1	8
110	Radiant Utama Interinsco Tbk.	3	1	12
111	Radiant Utama Interinsco Tbk.	3	1	12
112	Radiant Utama Interinsco Tbk.	3	1	11
113	Golden Eagle Energy Tbk.	3	1	4

114	Golden Eagle Energy Tbk.	3	1	4
115	Golden Eagle Energy Tbk.	3	1	4
116	SMR Utama Tbk.	3	1	2
117	SMR Utama Tbk.	3	1	2
118	SMR Utama Tbk.	3	1	4
119	Timah Tbk.	4	2	61
120	Timah Tbk.	4	2	55
121	Timah Tbk.	4	2	48
122	Toba Bara Sejahtera	3	1	8
123	Toba Bara Sejahtera	3	1	8
124	Toba Bara Sejahtera	3	1	8
125	Trada Alam Minera Tbk.	3	1	4
126	Trada Alam Minera Tbk.	3	1	4
127	Trada Alam Minera Tbk.	3	1	6
128	Kapuas Prima Coal Tbk.	3	1	5

LAMPIRAN 2

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FDISTRESS	128	0	1	.40	.492
ACSIZE	128	1	4	3.09	.470
ACINDP	128	0	2	1.00	.355
ACMEET	128	2	61	8.67	8.731
Valid N (listwise)	128				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FDISTRESS	51	1	1	1.00	.000
ACSIZE	51	2	4	3.10	.413
ACINDP	51	0	2	.94	.311
ACMEET	51	2	35	5.75	4.757
Valid N (listwise)	51				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FDISTRESS	77	.0	.0	.000	.0000
ACSIZE	77	1.0	4.0	3.078	.5070
ACINDP	77	.0	2.0	1.039	.3784
ACMEET	77	4.0	61.0	10.610	10.1452
Valid N (listwise)	77				

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Correlation Matrix

		Constant	ACSIZE	ACINDP	ACMEET
Step 1	Constant	1.000	-.877	.226	-.254
	ACSIZE	-.877	1.000	-.610	.047
	ACINDP	.226	-.610	1.000	-.113
	ACMEET	-.254	.047	-.113	1.000

Tabel 3. Hasil Uji Kelayakan Model

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	6.708	7	.460

Tabel 4. Hasil Uji *Chi Square*

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients			
		Constant	ACSIZE	ACINDP	ACMEET
Step 1 1	157.130	-1.870	.962	-.988	-.060
2	152.037	-1.575	1.062	-1.151	-.127
3	150.584	-1.048	1.007	-1.147	-.185
4	150.504	-.897	.991	-1.147	-.203
5	150.504	-.891	.991	-1.148	-.204
6	150.504	-.891	.991	-1.148	-.204

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 172.127

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Tabel 5. *Cox and Snell's R² and Nagelkerke's R²*

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	150.504 ^a	.155	.210

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Tabel 6. Matriks Klasifikasi

Classification Table^a

	Observed	Predicted		
		FDISTRESS		Percentage Correct
		0	1	
Step 1	FDISTRESS 0	64	13	83.1
	1	22	29	56.9
	Overall Percentage			72.7

a. The cut value is .500

Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi Koefisien Regresi

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step ACMEET	.991	.647	2.348	1	.125	2.694	.758	9.566
1 ^a ACINDP	-1.148	.905	1.610	1	.205	.317	.054	1.869
ACMEET	-.204	.068	8.937	1	.003	.816	.714	.932
Constant	-.891	1.668	.285	1	.593	.410		

a. Variable(s) entered on step 1: jumlahkomiteaudit, komiteauditindependen, jumlahrapatkomiteaudit.